

Pengembangan lembaga kemasyarakatan: PAMPENA dan DTA Assalam Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi melalui pendekatan aspek manajemen pengelolaan dan aspek hukum kelembagaan

Selji Salgangga¹, Mohamad Fazar Fadilah², Arif³, Ai Kusmiati Asyiah⁴, Mila Karmila⁵,
Rita Tri Yusnita⁶, Salsabila Al Zahra⁷, Gisan Hilman Hakim⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Affiliation

*seljisalgangga@unper.ac.id

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah barang tentu setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan kehidupannya salah satunya seperti sarana Pendidikan dan sarana penyediaan air bersih. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam lingkungannya masyarakat, secara swadaya membentuk lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pendidikan non formal dan kelompok penyediaan air bersih. namun dalam kegiatan operasional terdapat permasalahan atau kendala yang menghambat kemajuan lembaga tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan tersebut berupa aspek Manajemen pengelolaan organisasi, yang belum memiliki struktur organisasi, tata kelola, pencatatan keuangan, manajemen resiko yang ideal sehingga kesulitan untuk berkembang, dan aspek legalitas hukum, sebagai badan hukum untuk menaungi kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut. Dari permasalahan yang ditemukan, kami memandang perlu untuk melakukan pendampingan melalui pendekatan manajemen pengelolaan organisasi terdiri dari MSDM, Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan/Pencatatan Keuangan dan membentuk badan hukum yang manaungi lembaga kemasyarakatan tersebut. Sehingga lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki rencana strategis serta manajemen pengelolaan yang baik dan memiliki badan hukum yang manaungi untuk perkembangan lembaga kemasyarakatan yang berdampak pada kemanfaatan yang semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Lembaga Kemasyarakatan , Aspek Hukum,Manajemen Pengelolaan

ABSTRACT

In social life, of course, every individual will try to fulfill their life needs, one of which is educational facilities and clean water provision. In an effort to meet the needs of the community, they have independently formed community organizations that operate in the field of non-formal education and clean water supply groups. However, in operational activities there are problems or obstacles that hinder the progress of the institution. The problems faced by these social institutions are management aspect of organizational management, which does not yet have an ideal organizational structure, governance, financial recording, risk management so it is difficult to develop, and aspects of legal legality, as a legal entity to oversee the activities of the social institution. Based on the problems found, we see the need to provide assistance through an organizational management approach consisting of HRM, Operational Management, Financial Management/Financial Recording and forming a legal entity that oversees the social institution. So that the community institution has a strategic plan and good management and has a legal entity that oversees the development of the community institution which has an impact on the benefits that are increasingly felt by the surrounding community.

Keywords: Community Institutions, Legal Aspects, Management

Articel Received: 03/10/2024; **Accepted:** 05/02/2025

How to cite: Salgangga, S., dkk. (2025). Pengembangan lembaga kemasyarakatan : PAMPENA dan DTA Assalam Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi melalui pendekatan aspek manajemen pengelolaan dan aspek hukum kelembagaan. *Abdimas Siliwangi*, Vol 8 (1), 56-63. doi: 10.22460/as.v8i1.26173

A. PENDAHULUAN

Perumahan Pondok Nangela Indah merupakan sebuah pemukiman yang terletak di wilayah administrasi pemerintahan RW010 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi yang tidak terdapat jaringan PDAM sehingga warga masyarakat secara swadaya membangun organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan ketersediaan air bersih/pengelolaan air minum perum nangela yang disingkat menjadi PAMPENA. PAMPENA ini dalam kegiatan operasionalnya mengalirkan air bersih/air minum yang berasal dari sumur yang dialirkan ke setiap rumah warga dengan menggunakan jaringan pipa paralon dengan menerapkan tarif Rp.1500/Kubik.

Dilain hal, tokoh masyarakat perum nangela yang peduli terhadap pendidikan anak serta melihat banyak warga atau masyarakat yang memiliki anak usia dini maka secara swadaya tokoh masyarakat juga membentuk kelompok belajar di DKM Assalam yang saat ini menjadi DTA Assalam yang dalam kegiatannya memberikan fasilitas Pendidikan agama islam nonformal untuk anak usia dini.

Berdasarkan uraian diatas di wilayah RW 010 Kelurahan cigantang terdapat dua lembaga kemasyarakatan yaitu PAMPENA dan DTA Assalam yang dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa air bersih dan sarana atau fasilitas pendidikan untuk anak usia dini. Namun berdasarkan hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat, terdapat kendala-kendala yang menghambat kemajuan lembaga kemasyarakatan yang diakibatkan karena belum terbentuknya badan hukum lembaga kemasyarakatan dan belum terciptanya manajemen pengelolaan yang ideal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk pengembangan lembaga kemasyarakatan tersebut, karena berdasarkan referensi dari artikel penelitian terdahulu, lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting untuk pengembangan lingkungan yang ada dalam suatu wilayah, Karena Dalam Permendagri Pasal 1 ayat 1 Nomor 5 Tahun 2007 perihal Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menegaskan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibuat/didirikan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, serta merupakan rekan/mitra lurah dan Pemerintah Desa dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf dalam bukunya (2015:100) mengemukakan bahwa yang menjadi tujuan dari pembentukan lembaga kemasyarakatan ialah agar terpelihara dan terlestariannya nilai-

nilai kehidupan yang ada di masyarakat berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kedua nilai tersebut adalah sendi pokok yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Sedangkan yang dikemukakan oleh Saparin (Rauf dan Munaf, 2015: 101) tujuan dari pembentukan lembaga masyarakat adalah dalam rangka peningkatan kelancaran terlaksananya tugas-tugas pembangunan, kemasyarakatan serta pemerintahan(SIREGAR 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dipandang perlu melakukan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan tersebut dengan membuat badan hukum kelembagaan karena badan hukum atas aspek legal akan berpengaruh terhadap bagaimana cara organisasi atau kelembagaan kemasyarakatan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya. Karena Menurut Supramono, Badan hukum merupakan sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.(Derita Prapti Rahayu et al. 2021) .Selanjutnya melakukan pendampingan melalui sosialisasi manajemen pengelolaan kelembagaan diantaranya manajemen sumber daya manusia,penyusunan standar operasional prosedur,penyusunan SOTK,manajemen rantai pasokan, dan pencatatan laporan keuangan.

Manajemen pengelolaan organisasi atau kelembagaan dipandang penting dalam sebuah organisasi kelembagaan kemasyarakatan karena Manajemen yang efektif menjadi kunci sukses bagi organisasi sosial dalam mencapai tujuan mereka, terutama di Indonesia yang memiliki lanskap sosial yang kompleks. Pengelolaan organisasi sosial memerlukan pendekatan yang terencana dan terstruktur untuk memastikan keberlanjutan kegiatan, kualitas layanan, dan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani(Mere and Wisnuwardhana 2024). Sehingga kegiatan pengabdian dengan melakukan pendekatan melalui aspek hukum dan manajemen pengelolaan organisasi atau kelembagaan, besar harapan organisasi atau kelembagaan tersebut dapat berkembang dengan baik dan kemanfaatannya semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar.

B. LANDASAN TEORI

Badan Hukum bisa memberikan perlindungan hukum yang penting untuk organisasi atau lembaga kemasyarakatan PAMPENA dan DTA Aslama Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dengan terbentuknya badan hukum, organisasi atau lembaga kemasyarakatan PAMPENA dan DTA Assalam akan memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Hal ini memberikan hak-hak dan kewajiban yang lebih jelas, serta akses ke berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam mengakses sumber daya, dukungan pemerintah, dan fasilitas lainnya. Dengan berbadan-hukum organisasi atau lembaga kemasyarakatan tersebut juga dapat lebih mudah mengatur kegiatan yang ada, mengelola keuangan, dan melakukan transaksi hukum, sesuai dengan aturan (AD/ART) yang tertuang dalam badan hukum tersebut (Novia, Noorhidayah, and Habibah 2023). Secara keseluruhan, badan hukum dapat memberikan landasan yang kokoh bagi organisasi atau kelembagaan masyarakat PAMPENA dan DTA Assalam untuk berkembang sehingga kemanfaatan bagi masyarakat sekitar semakin meningkat. Kepentingan. Menurut Sucipto (2020), konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memainkan peranan krusial dalam peningkatan efektivitas organisasi. Armstrong menekankan bahwa MSDM bukan sekadar tentang pengelolaan tenaga kerja, melainkan meliputi serangkaian strategi dan proses yang komprehensif. Tujuan utama dari MSDM, seperti dijelaskan oleh Armstrong, adalah untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan dan strategi organisasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga retensi karyawan (Sartika 2024).

Sumber daya manusia sebagai penggerak operasional pada organisasi dalam perusahaan yang mana fungsi manusia yang bekerja secara individu atau kelompok dengan arahan pimpinan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. "Struktur organisasi merupakan rancangan dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi" (Ivancevich, 2007:235) (Gammahendra, Hamid, and Riza 2014)

Keberhasilan suatu organisasi atau kelembagaan dalam kegiatan operasional guna mencapai tujuannya merupakan harapan semua organisasi atau kelembagaan, upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak

manajemen organisasi atau kelembagaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen organisasi atau kelembagaan adalah dengan membuat dan menjalankan aturan dengan baik dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga memudahkan manajemen organisasi/kelembagaan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Budihardjo (2014:19) mengemukakan yang mana "Standard Operating Procedures (SOP) merupakan suatu perangkat lunak peraturan, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu". Ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja pegawai adalah motivasi, komunikasi, pelatihan, gaya kepemimpinan, reward dan punishment, standar operasional prosedur serta pengawasan dan lain-lain (Golu et al. 2024).

C. METODE PELAKSANAAN

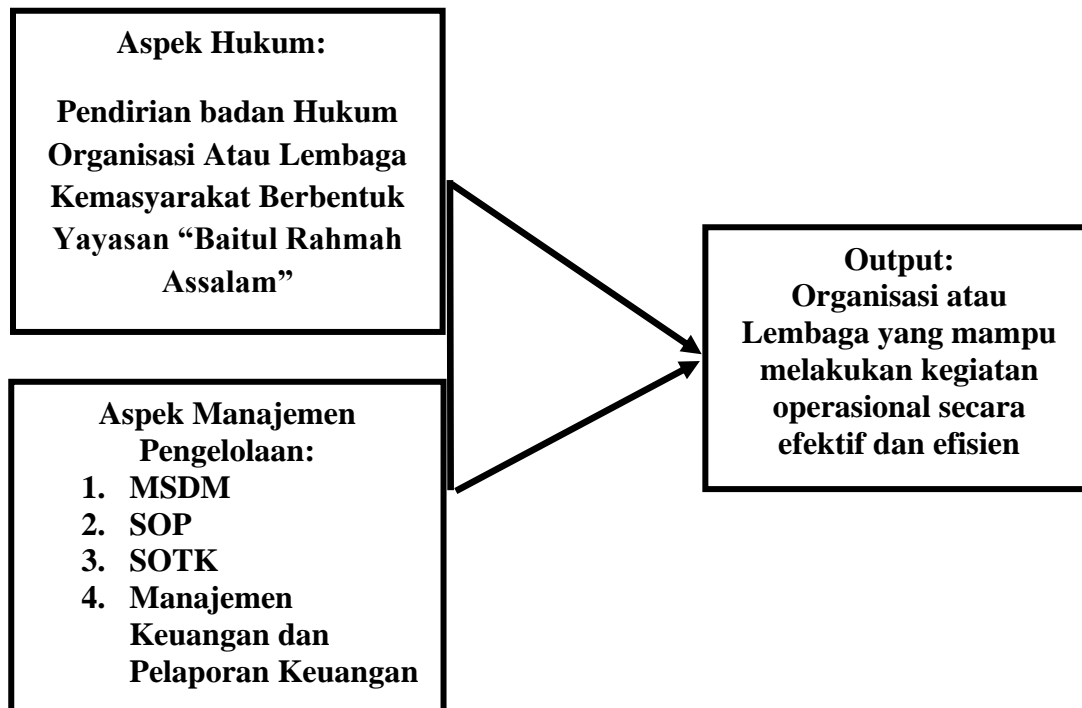
Pelaksanaan dengan metode sosialisasi terkait pentingnya aspek hukum kelembagaan dan aspek manajemen pengelolaan organisasi kemasyarakatan kepada tokoh dan pengelola organisasi kemasyarakatan. Pengabdian dilakukan selama 60 hari dari mulai proses awal pembuatan badan hukum yang berbentuk Yayasan di kantor Notaris Wawan Ridawan, S.H., M.Kn. sampai dengan terbit akta Notaris tentang pendirian Yayasan Baitul Rahmah Assalam untuk menaungi lembaga Pendidikan DTA Assalam dan PAMPENA. Setelah akta notaris terbit tim pengabdian melakukan pendampingan terkait pembuatan instrument aspek manajemen pengelolaan organisasi terdiri dari manajemen sumber daya manusia, penyusunan standar prosedur, penyusunan SOTK, manajemen rantai pasokan, dan pencatatan laporan keuangan dalam organisasi kemasyarakatan.

Sehingga tim pengabdian melakukan pendampingan dalam pembuatan struktur organisasi, manajemen tatakelola, manajemen keuangan, manajemen resiko organisasi, manajemen rantai pasokan dalam sebuah organisasi perusahaan, dan manajemen keuangan sehingga organisasi tersebut dapat merumuskan design struktur organisasi serta mengelola dengan baik sumber daya yang ada dalam organisasi untuk keberlangsungan organisasi tersebut dan kemannfaatannya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat dilihat dari pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang lebih baik dan telah memiliki legalitas hukum dalam kegiatan operasionalnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan produk yang mampu menjawab permasalahan mitra selama ini yaitu belum memiliki legalitas hukum dan instrument manajemen pengelolaan yang jelas. Dengan terbitnya akta notaris pendirian Yayasan Baitul Rahmah Assalam yang akan menaungi organisasi kelembagaan masyarakat PAMPENA dan DTA Assalam serta terciptanya instrument manajemen pengelolaan telah mampu menjawab permasalahan yang dialami oleh mitra. Sehingga organisasi tersebut dalam kegiatan operasionalnya memiliki legalitas hukum yang jelas sehingga dapat mengembangkan organisasi sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya dengan mananejmen pnglolaan yang baik sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi.



E. KESIMPULAN

Badan hukum kelembagaan dan manajemen pengelolaan kelembagaan merupakan aspek penting yang menjadi modal pokok untuk keberlangsungan sebuah organisasi atau lembaga. Yang membuat peluang untuk organisasi atau lembaga melkakukan pengembangan sesuai harapan dan tahapan yang direncanakan dengan efektif dan efisien.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Terimakasih kami sampaikan kepada lembaga Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian, dan kami sampaikan terimakasih juga kepada pengurus Organisasi Lembaga Kemasyarakatan PAMPENA serta Pengurus DTA Assalam dan kepada tokoh masyarakat perum pondok Nangela Indah RW 010 Kelurahan Cigantang yang telah bersedia menjadi mitra tim pengabdian.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Derita Prapti Rahayu et al. (2021). "Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)." *Perspektif Hukum*: 1–16. doi:10.30649/ph.v21i2.89.
- Gammahendra, Fianda, Djamhur Hamid, and Muhammad Faisal Riza. (2014). "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 7(2): 1–10.
- Golu, Noni Netralis, Eduard Baene, Yamolala Yamolala, and Aferiaman Telaumbanua. (2024). "Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ma'U Kabupaten Nias." *Jurnal Tunas Pendidikan* 6(2): 373–79. doi:10.52060/pgsd.v6i2.1636.
- Mere, Klemens, and Universitas Wisnuwardhana. (2024). "Evaluation of management system effectiveness in the management of social organizations in indonesia." 7.
- Novia, Rifki Andi, Ratri Noorhidayah, and Nurul Habibah. (2023). "Penguatan Kelembagaan Serta Penerapan Cara Pengolahan Pangan Yang Baik Dalam Produksi Tepung Mocaf Dan Olahannya Di KWT 'Srikandi I' Desa Punggelan." 8(1): 126–34.
- Sartika, Gita. (2024). "Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Kesuksesan Organisasi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4(1): 177–88.
- Siregar, Achyar Hanif. (2021). "Penguatan Identitas Nasional Indonesia Melalui Perencanaan Pembangunan Berbasis Lembaga Kemasyarakatan." *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2(1): 01–16. doi:10.53990/djep.v2i1.103.